



**11 Juli 2018** 

Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta



### **Dadang Solihin**

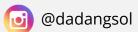
Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015 - 2019.

Selama 30 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Sejak 2015 ia dipercayai menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), dan sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).

#### **Personal Contact**





0812-9322-202



dadang-solihin.blogspot.co.id



**Dadang Solihin** 



dadangsol@gmail.com



Slideshare: Dadang Solihin

### MATERI



- Visi-Misi Anies-Sandi
- 5 Langkah Optimalisasi DRD DKI
- I.A. Pedoman Prosedur Tata Kerja DRD DKI
- I.B. Pedoman Prosedur Tata Tertib DRD DKI
- II. Key Performance Indicators DRD DKI
- III. Perumusan Produk DRD DKI
- IV. Pelaporan & Publikasi Produk DRD DKI
- V. Pemanfaatan Produk DRD DKI



bagi semua.

# **MISI ANIES-SANDI**



Menjadikan Jakarta kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilainilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan. menggerakan dan memanusiakan.

Menjadikan Jakarta kota memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi dan melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis, dan berintergritas.

Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Menjadikan Jakarta Ibu Kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan. kebangsaan dan kebhinekaan.



### **5 LANGKAH OPTIMALISASI DRD DKI**

#### **Penyusunan Pedoman Prosedur DRD DKI**



#### Prosedur Tata Kerja DRD

- 1.Prosedur Pembuatan Produk DRD
- 2. Prosedur Proses Adopsi
- 3. Prosedur Pemecahan Permasalahan Aktual Daerah
- 4. Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja DRD dengan Instansi Terkait Daerah

#### **Prosedur Tata Tertib DRD**

- 1. Prosedur Organisasi DRD
- 2. Prosedur Keanggotaan **DRD**
- 3. Prosedur Pengambilan Keputusan DRD
- 4. Prosedur Keuangan dan Administrasi

#### Perumusan Key Performance **Indicators DRD DKI**

- 1. Program/Kegiatan
- 2. Output
- 3. Outcome
- 4. Baseline 2018
- 5. Target Kinerja 2018-2022



#### Perumusan **Produk DRD DKI**

#### **Produk DRD**

- 1. Tata Kerja DRD DKI
- 2. Tata Tertib DRD DKI
- 3. Analisis Kebutuhan Stakeholders

JAYA RAYA

- 4. Kebijakan Strategis IPTEK DKI
- 5. Agenda Riset DKI
- 6. Pemetaan Kegiatan Riset DKI

### Pelaporan & Publikasi **Produk DRD DKI**



#### Pelaporan

- 1.Gubernur DKI
- 2.Kepala Bappeda

#### **Publikasi**

- 1.Hard Copy
- 2.Soft Copy (*on-line*)

#### Pemanfaatan **Produk DRD DKI**

1. Produk DRD yang berupa dokumen perencanaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perencanan Pembangunan Daerah.

- Dapat diakses oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3. Dapat diadopsi menjadi Keputusan atau Kebijakan Pemerintah Daerah.
- 4. Dapat didiseminasikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait melalui berbagai forum dan media, baik elektronik maupun non elektronik.



### I.A. PEDOMAN PROSEDUR TATA KERJA DRD DKI

#### Pedoman Prosedur Pembuatan Produk DRD

- Proses pembuatan produk DRD dilakukan berdasarkan Metode Kerja dan Pelaksanaan Pekerjaan tertentu.
- Penyusunan Metode Kerja dapat dilakukan berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tupoksi DRD.
- Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur, pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.

#### **Pedoman Prosedur Proses Adopsi**

- Proses adopsi terhadap produk DRD diawali dengan proses pelaporan Panitia Ad Hoc kepada Badan Pekerja DRD.
- Selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan persetujuan (sanctioning) untuk menguji ketepatan laporan tersebut dalam Rapat Badan Pekerja DRD dan Rapat Paripurna DRD.
- Dalam Rapat Paripurna diputuskan untuk menerima atau menolak mengadopsi laporan tersebut menjadi produk DRD.

#### Pedoman Prosedur Pemecahan Permasalahan Aktual Daerah

Prosedur ini sama dengan Prosedur Pembuatan Produk DRD sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diawali dengan pembentukan Panitia Ad Hoc oleh Badan Pekerja DRD.

### Pedoman Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja DRD dengan Instansi Pusat/Daerah

- Prosedur mekanisme hubungan kerja antara DRD dengan instansi pusat maupun daerah (termasuk dengan Perguruan Tinggi dan dunia usaha) memuat posisi dan peran DRD dalam pembangunan IPTEK daerah.
- Dengan posisi dan peran DRD yang jelas, maka penyelenggaraan kegiatan DRD akan memberikan kontribusi yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan IPTEK daerah.

### I.B. PEDOMAN PROSEDUR TATA TERTIB DRD DKI



#### Pedoman Prosedur Organisasi DRD

Prosedur ini memuat kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hubungan kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing organware organisasi DRD, yakni Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Badan Pekerja, Komisi Teknis dan Panitia Ad Hoc.

#### Pedoman Prosedur Keanggotaan DRD

Prosedur ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan DRD, antara lain kriteria anggota, rekruitmen anggota, pengembangan kompetensi anggota, masa bakti keanggotaan, pemberhentian dan penggantian keanggotaan, perwakilan anggota DRD dalam keanggotaan DRN.

#### Pedoman Prosedur Pengambilan Keputusan DRD

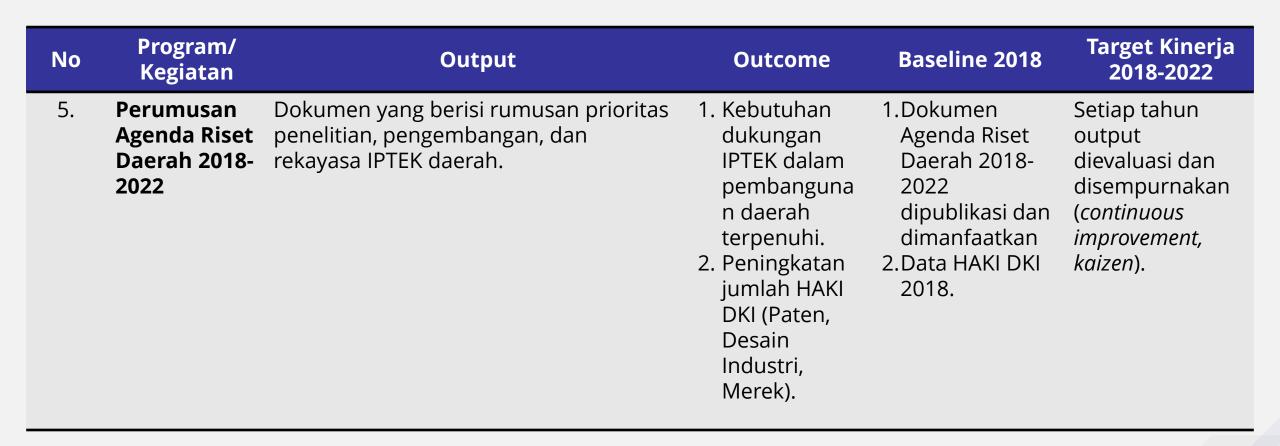
- Prosedur ini memuat tata cara pengambilan keputusan DRD melalui sidang/rapat pada Komisi Teknis, Panitia Ad Hoc, Badan Pekerja dan Rapat Paripurna DRD.
- Prosedur ini juga memuat tata cara pembuatan dan penetapan keputusan pimpinan DRD menjadi produk hukum yang berlaku di lingkungan DRD.

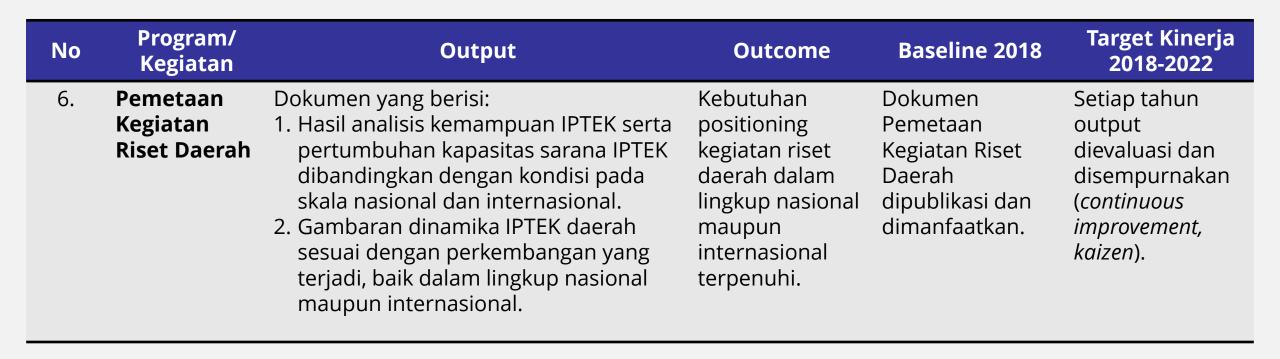
#### Pedoman Prosedur Keuangan dan Administrasi

- Pedoman ini memuat tata cara pengajuan dan pertangggungjawaban biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan DRD mengingat sumber pendanaan DRD dapat berasal dari APBD maupun non APBD.
- Penggunaan/alokasi dana APBD bagi penyelenggaraan kegiatan DRD sebagai organisasi non struktural di lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan agar penggunaan dana APBD tersebut akuntabel dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke publik.

No	Program/ Kegiatan	Output	Outcome	Baseline 2018	Target Kinerja 2018-2022
1.	Penyusunan Tata Kerja DRD	<ol> <li>Dokumen:</li> <li>Pedoman Prosedur Pembuatan         Produk DRD     </li> <li>Pedoman Prosedur Proses Adopsi</li> <li>Pedoman Prosedur Pemecahan         Permasalahan Aktual Daerah     </li> <li>Pedoman Prosedur Mekanisme         Hubungan Kerja DRD dengan Instansi         Pusat/Daerah.     </li> </ol>	Tata Kerja DRD terkelola dengan baik.	4 buah dokumen Tata Kerja DRD dipublikasi dan dimanfaatkan.	Setiap tahun output dievaluasi dan disempurnakan (continuous improvement, kaizen).
2.	Penyusunan Tata Tertib DRD	<ol> <li>Dokumen:</li> <li>Pedoman Prosedur Organisasi DRD</li> <li>Pedoman Prosedur Keanggotaan DRD</li> <li>Pedoman Prosedur Pengambilan Keputusan DRD</li> <li>Pedoman Prosedur Keuangan dan Administrasi</li> </ol>	Tata Tertib DRD terkelola dengan baik.	4 buah dokumen Tata Tertib DRD dipublikasi dan dimanfaatkan.	Setiap tahun output dievaluasi dan disempurnakan (continuous improvement, kaizen).

No	Program/ Kegiatan	Output	Outcome	Baseline 2018	Target Kinerja 2018-2022
3.	Analisis Kebutuhan <i>Stakeholders</i>	<ol> <li>Dokumen yang berisi:</li> <li>Solusi permasalahan yang dihadapi Pemda dalam pembangunan daerah.</li> <li>Kebijakan litbang dan prioritasnya sesuai dengan kebutuhan industri.</li> <li>Pemanfaatan IPTEK yang secara signifikan meningkatkan kesejahteraan.</li> </ol>	Percepatan inovasi daerah terdukung.	Dokumen Analisis Kebutuhan <i>Stakeholders</i> dipublikasi dan dimanfaatkan.	Setiap tahun output dievaluasi dan disempurnakan (continuous improvement, kaizen).
4.	Perumusan Kebijakan Strategis IPTEK Daerah	Dokumen Kebijakan Strategis IPTEK Daerah yang berisi rumusan yang mengacu pada Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional IPTEK	Kebutuhan kebijakan strategis IPTEK daerah terpenuhi.	Dokumen Kebijakan Strategis IPTEK Daerah dipublikasi dan dimanfaatkan.	Setiap tahun output dievaluasi dan disempurnakan (continuous improvement, kaizen).





### III. PERUMUSAN PRODUK DRD DKI

#### Tata Tertib dan Tata Kerja DRD

Produk ini digunakan sebagai acuan kerja DRD.



#### **Analisis Kebutuhan Stakeholders**

- Produk ini digunakan untuk mendukung percepatan inovasi daerah.
- DRD melakukan *demand support transaction* secara alamiah dengan *stakeholders* di lingkungannya, artinya ada transaksi untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- Isi dari transaksi dapat berupa:
  - a. Solusi pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi Pemda dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Pemda dapat mengalokasikan biaya pendanaan dari anggaran daerah;
  - b. Kebijakan litbang dan prioritasnya sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam konteks ini, industri menyediakan dana penelitian dan informasi kebutuhannya;
  - c. Hasil kerja DRD yang secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat , misalnya melalui pemanfaatan IPTEK. Masyarakat dapat mendukung DRD melalui DPRD dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui APBD;
  - d. Berbagai hal yang bermanfaat dapat diberikan oleh angota DRD sebagai warga masyarakat yang juga dapat bertindak sebagai stakeholders. Dalam konteks ini diperlukan pengadopsian dan pemberian legitimasi atas berbagai gagasan yang diajukan tersebut.

#### Kebijakan Strategis IPTEK Daerah

Perencanaan pembangunan dan penerapan IPTEK di suatu daerah dalam pelaksanaannya mengacu pada Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional IPTEK yang disusun dan dirumuskan dalam Kebijakan Strategis Pembangunan IPTEK Daerah.

### III. PERUMUSAN PRODUK DRD DKI



#### **Agenda Riset Daerah**

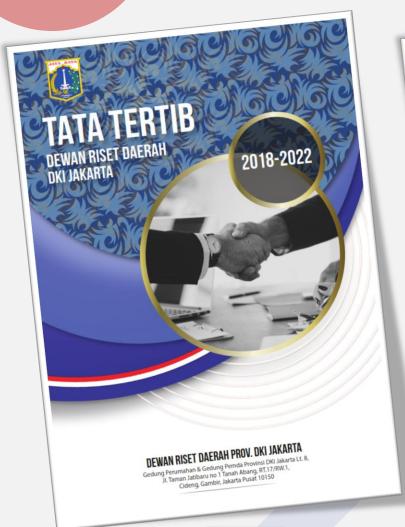
- Agenda Riset Daerah merupakan rumusan prioritas penelitian, pengembangan, dan rekayasa IPTEK daerah untuk memenuhi kebutuhan dukungan IPTEK dalam pembangunan daerah.
- Agenda Riset Daerah adalah dokumen produk DRD yang berlaku untuk kurun waktu tertentu, dan harus selalu dimutakhirkan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
- Produk ini ditawarkan kepada para pelaku IPTEK di daerah dan dijadikan panduan dalam perencanaan kegiatan penelitian, pengembangan serta perekayasaan IPTEK yang dilakukan untuk keperluan pembangunan daerah.

#### **Pemetaan Kegiatan Riset Daerah**

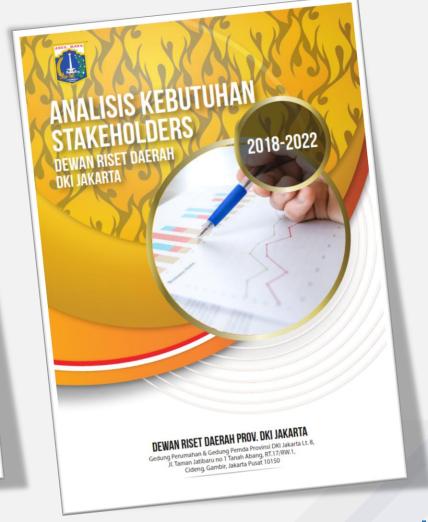
- Produk ini merupakan hasil analisis berbagai aspek kemampuan IPTEK serta pertumbuhan kapasitas sarana IPTEK dibandingkan dengan kondisi pada skala nasional dan internasional.
- Pemetaan kegiatan IPTEK yang dilakukan secara terus menerus akan menghasilkan gambaran dinamika IPTEK daerah sesuai dengan perkembangan yang terjadi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.



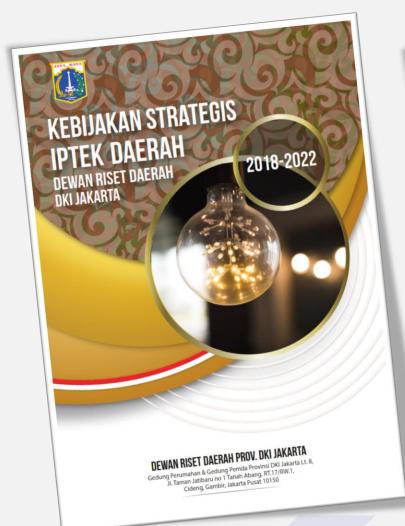
### IV. PELAPORAN & PUBLIKASI PRODUK DRD DKI







## IV. PELAPORAN & PUBLIKASI PRODUK DRD DKI



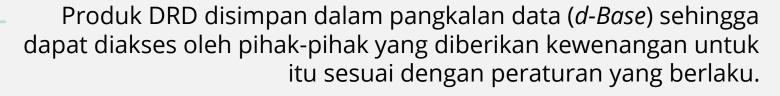








Produk DRD yang berupa dokumen perencanaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.







Produk DRD, setelah dilakukan peninjauan ulang, penyesuaian, serta penyempurnaan, dapat diadopsi menjadi Keputusan atau Kebijakan Pemerintah Daerah.

> Produk DRD dapat didiseminasikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait melalui berbagai forum dan media, baik elektronik maupun non elektronik.



